

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amin, Fakhry, dkk. *Hukum Pertambangan Indonesia: Teori, Regulasi, dan Dinamika Pengelolaannya*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2026.

Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Cet. I. Pangkalpinang: UBB Press, 2018.

Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Kotijah, Siti, dan Ine Ventyrina. *Buku Ajar Hukum Perizinan: Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko*. Edisi Revisi. Samarinda: Mulawarman University Press, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhjad, M. Hadin. *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Nugroho, Wahyu. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.

Pamuji, Kadar, dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press, 2023.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. IX. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. VII. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Rosnawati, Emy, dan M. Tanzil Multazam. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2022.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sushanty, Vera Rimbawani. *Buku Ajar Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press, 2020.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Zuhdi, Muhammad. *Buku Ajar Pengantar Geologi*. Mataram: Duta Pustaka Ilmu, 2019.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Larasati, A. B., Pujiyono, dan Muhamad Azhar. "Pendekatan Penal dalam Kerangka Politik Kriminal untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C di Wilayah Wonosobo." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 121–135.

Lestari, Sulistyani Eka, dan Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147–163.

Listiyani, Nurul, Muzahid Akbar Hayat, dan Ningrum Ambarsari. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 116–130. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2650>.

Natalis, Aga, Budi Gutami, dan Muhamad Azhar. "Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–17.

Putri, Rizkyana Zaffrindra, dan Lita Tyesta A.L.W. "Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara." *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 199–206.

Ramansyah, Radhityo. "Pengawasan Kegiatan Pertambangan Batuan dalam Kaitannya dengan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Semarang." Skripsi, Universitas Semarang, 2017.

Redi, Ahmad. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil." *Jurnal Rechts Vinding* 5, no. 3 (2016): 405–420.

Ridwan HR. "Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 18 (2001): 71–85.

Syamsudin, Jailani. "Peralihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 45–51.

Wahyudi, Yusuf. "Kapabilitas Pemerintah Daerah terhadap Pertambangan Ilegal di Kabupaten Berau." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. "Izin." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>.

F. Wawancara dan Dokumen

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. *Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Subang*. Dokumen diperoleh penulis, 25 Mei 2026.

Rustiady, Tedy. Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Wawancara oleh penulis. Bandung, 25 Mei 2026.

Rustiady, Tedy. Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Wawancara oleh penulis. Bandung, 27 Juli 2026.

Saefuloh. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Wawancara oleh penulis. Kabupaten Subang, 25 Mei 2026.

G. Media Massa

Nurdin, Ahya. "Sidak KDM di Subang, Polres Segel Tambang Batu Tak Berizin di Kasomalang." *Kompas.com*, 21 Januari 2026. <https://bandung.kompas.com/read/2026/01/21/182543278/sidak-kdm-di-subang-polres-segel-tambang-batu-tak-berizin-di-kasomalang>.

Rubiah, Hilda. "Dedi Mulyadi Sidak Tambang Ilegal di Subang Tengah Malam, Tegas Ancam Pidanakan." *Tribun Jabar*, 22 Januari 2026. <https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1162067/dedi-mulyadi-sidak-tambang-ilegal-di-subang-tengah-malam-tegas-ancam-pidanakan>.

Setiadi, Indrawan. "Dedi Mulyadi Soroti Praktik Tambang Ilegal di Subang." *Pasundan Ekspres*, 13 Mei 2026. <https://pasundanekspres.id/read/subang/pe-177866265145/dedi-mulyadi-soroti-praktik-tambang-ilegal-di-subang>.